



**PROSES PENGURUSAN RPK PADA *WEBSITE* SIMLALA
DI PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran
di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

**ANISAH NUR HASANAH
NIT. 572011337573 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

PROSES PENGURUSAN RPK PADA *WEBSITE* SIMLALA
DI PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK

Disusun Oleh:

ANISAH NUR HASANAH
NIT. 572011337573 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.....

Dosen Pembimbing I
Materi

Dosen Pembimbing II
Metodelogi dan Penulisan

Awel Suryadi, S.ST., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770525 200502 1 001

Kresno Yuntoro, S.ST., M.M.
Penata (III/c)
NIP. 19710312 201012 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Dr. Latifa Ika Sari, S.Psi, M.Pd.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850731 200812 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Proses Pengurusan RPK pada *Website* SIMLALA di PT Buana Lintas Lautan Tbk.” karya:

Nama : ANISAH NUR HASANAH

NIT : 572011337573 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari..... tanggal 2024

Semarang.....

PENGUJI

Penguji I : FAJAR TRANSELASI, S.Tr., M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19760310 201012 1 001

Penguji II : AWEL SURYADI, S.ST., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770525 200502 1 001

Penguji III : FITRI ZUHRIYAH, S.Psi., M.Sc.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840517 200912 2 001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. SUKIRNO, M.M.Tr., M.Mar.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671210 199903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANISAH NUR HASANAH

NIT : 572011337573 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Skripsi dengan judul "PROSES PENGURUSAN RPK PADA WEBSITE SIMLALA DI PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK"

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang,

Yang saya nyatakan,

(M)

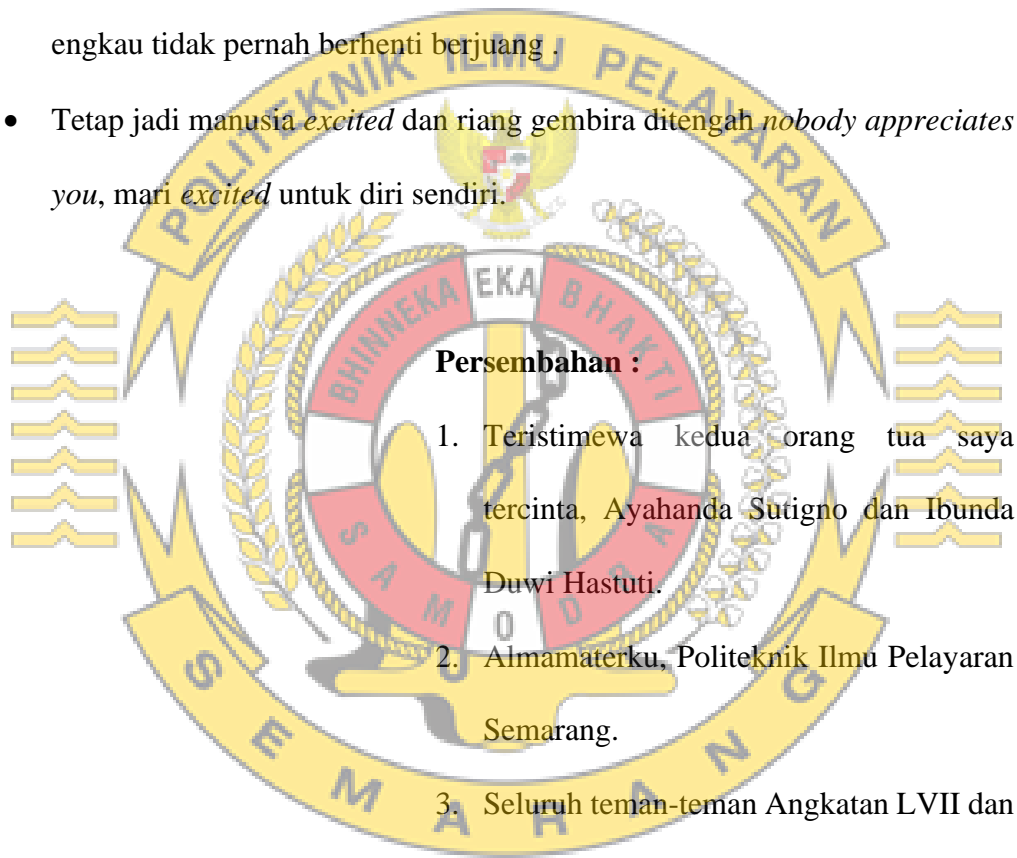


ANISAH NUR HASANAH
NIT.572011337573 K

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar – QS Ar Ruum:60
- Tidak peduli seberapa pelannya engkau berjalan, yang terpenting adalah engkau tidak pernah berhenti berjuang .
- Tetap jadi manusia *excited* dan riang gembira ditengah *nobody appreciates you*, mari *excited* untuk diri sendiri.



Persembahan :

1. Teristimewa kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Sutigno dan Ibunda Duwi Hastuti.
2. Almamaterku, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Seluruh teman-teman Angkatan LVII dan KALK VIII *Delta*.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Proses Pengurusan RPK pada *Website* SIMLALA di PT Buana Lintas Lautan Tbk.”.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S. Tr. Pel) dalam bidang Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK) Program Diploma IV (D.IV) di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Capt. Sukirno, M.M.Tr., M.Mar., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Ibu Dr. Latifa Ika Sari, S.Psi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Bapak Awel Suryadi, S.ST., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Materi.
4. Bapak Kresno Yuntoro, S.ST., M.M., selaku Dosen Pembimbing Metodologi dan Penulisan.
5. Bapak/Ibu Dosen Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
6. Ayahanda dan Ibunda saya tercinta, orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat peneliti sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Orang tua yang tak henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial.

Terimakasih atas setiap doa, ridho, dan tetes keringat yang telah tumpah dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang tua.

7. Sahabat saya tercinta, Shima As Shiffa dan Dellia Putri Octavia. Terimakasih telah menemani, mendukung, ataupun menghibur peneliti dalam kesedihan.
8. Seluruh staff, mentor, pegawai, dan senior yang bekerja di PT Buana Lintas Lautan Tbk yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
9. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa peneliti sebut namanya, yang memberi semangat dan yang berkata akan menunggu hingga kelulusan peneliti, walau nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan peneliti hingga akhir. Terimakasih atas patah hati yang diberikan saat proses penyusunan penelitian ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Demikian prakata ini, kami menyadari masih banyak kekurangan sehingga kami mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan dapat menjadi bahan literasi di perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Semarang, 2024
Peneliti

ANISAH NUR HASANAH
NIT. 572011337573 K

ABSTRAKSI

Hasanah, Anisah Nur, NIT. 572011337573 K, 2024, “Proses Pengurusan RPK Pada *Website* SIMLALA di PT. Buana Lintas Lautan Tbk”. Skripsi, Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Awel Suryadi, S.ST., M.Si. Pembimbing II: Kresno Yuntoro, S.S.T., M.M.

Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA) ditetapkan pemerintah untuk memfasilitasi pemesanan layanan angkutan laut umum secara *online*, termasuk pengelolaan rencana pengoperasian kapal (RPK). Dalam sistem tersebut terdapat keterlambatan penyelesaian dokumen RPK sehingga diperlukan peningkatan implementasi SIMLALA, mengidentifikasi kendala dan upaya pada sistem yang bertujuan untuk memudahkan pemantauan operasional pelayanan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sistematis deskriptif. Sumber data didapatkan melalui data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi selama melaksanakan praktek darat di PT. Buana Lintas Lautan Tbk. Instrumen penelitian merupakan peneliti sendiri sebagai kunci utama penelitian didukung dengan instrumen pendukung yakni data wawancara pada narasumber terkait guna memperoleh keabsahan data penelitian. Teknik analisa data menggunakan pengumpulan dan pemilihan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Beberapa tahapan pengurusan RPK pada *website* SIMLALA meliputi proses *login*, pendaftaran RPK tramper khusus, mengisi kolom pada *website* hingga terverifikasi oleh DITLALA, melakukan pembayaran *invoice* sehingga mendapatkan RPT untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Penyebab keterlambatan pengurusan RPK menggunakan *website* SIMLALA adalah buruknya koneksi internet, *server error* pada *website*, kapasitas dokumen kapal terlalu besar sehingga berdampak penundaan pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Upaya menghambat keterlambatan pengurusan RPK adalah dengan penambahan *provider* internet, *maintenance website*, penggunaan *website* kompres dokumen.

Kata Kunci: Keterlambatan, Pengurusan RPK, *Website* SIMLALA

ABSTRACT

Hasanah, Anisah Nur, NIT. 572011337573 K, 2024, “*RPK Management Process on the SIMLALA Website at PT. Buana Lintas Lautan Tbk*”. Thesis, Diploma IV Program, Port and Shipping Studies, ‘Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 1st Supervisor : Awel Suryadi, S.ST., M.Si. 2nd Supervisor : Kresno Yuntoro, S.S.T., M.M.

The government has established the Sea Traffic and Transport Information System (SIMLALA) to facilitate online ordering of public sea transport services, including managing ship operation plans (RPK). In this system there is a delay in completing the RPK document, it is necessary to increase the implementation of SIMLALA, identify obstacles and efforts in the system to facilitate operational monitoring of services.

The research method used is a qualitative method with descriptive systematics. Data sources were obtained through primary and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews, literature study and documentation during carrying out land practices at PT. Buana Lintas Laut Tbk. Research instrument is the researcher himself as the main key to research supported by supporting instruments, namely interview data on related resource persons to obtain the validity of research data. Data analysis techniques use data collection and selection, data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions.

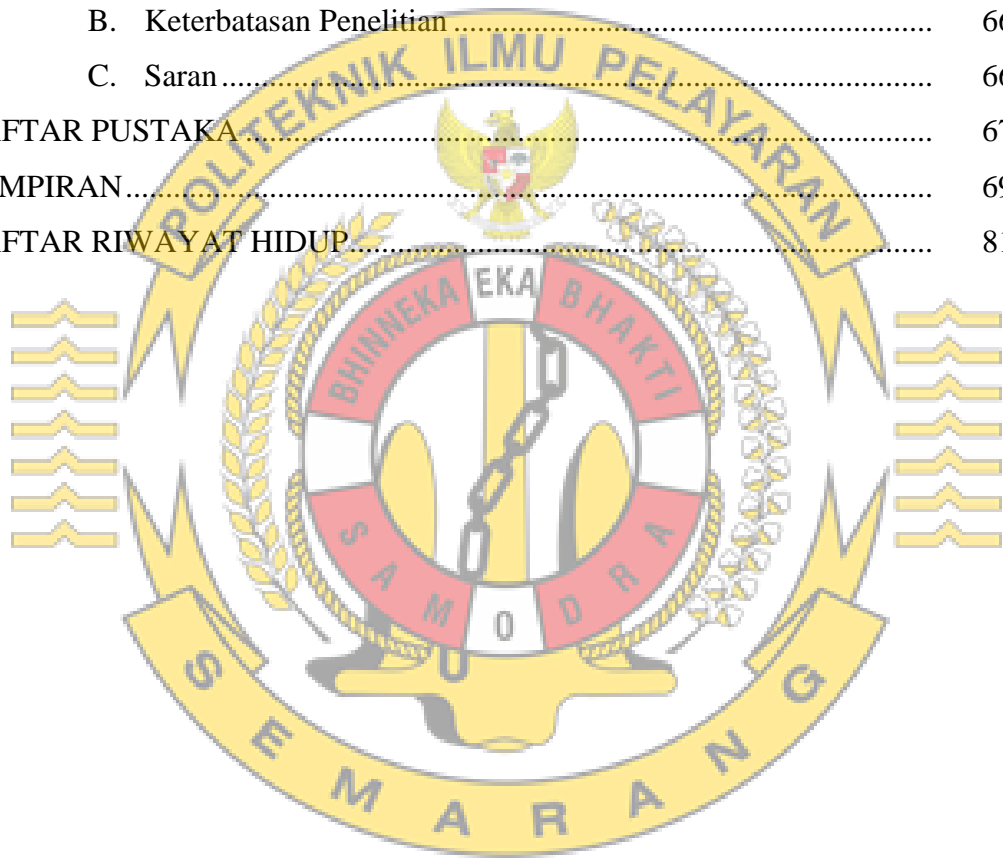
Several stages of processing the RPK on the SIMLALA website include the login process, registering a special tramper RPK, filling the columns on the website until it is verified by DITLALA, making invoice payments until get an RPT to carry out loading and unloading activities. The causes of delays in processing the RPK using the SIMLALA website are poor internet connection, server errors on website, the ship's document capacity is large which results in delays submitting the Sailing Approval Letter (SPB). Efforts to prevent delays in processing the RPK include adding internet providers, website maintenance, using document compression websites.

Keywords: *Delays, RPK Management, SIMLALA Website.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAKSI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	ii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Deskripsi Teori.....	10
B. Kerangka Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Tempat Penelitian.....	23
C. Sampel Sumber Data Penelitian / Informan.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	30
G. Pengujian Keabsahan Data.....	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN	37
	A. Gambaran Konteks Penelitian	37
	B. Deskripsi Data	40
	C. Temuan	49
	D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	65
	A. Simpulan.....	65
	B. Keterbatasan Penelitian	66
	C. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN.....		69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		81



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	39
Tabel 4. 2 Alamat Perusahaan.....	41
Tabel 4. 3 Nama Kapal dan Perusahaan.....	42
Tabel 4. 4 Struktur Organisasi Perusahaan	48
Tabel 4. 5 Dokumen Persyaratan RPK.....	57

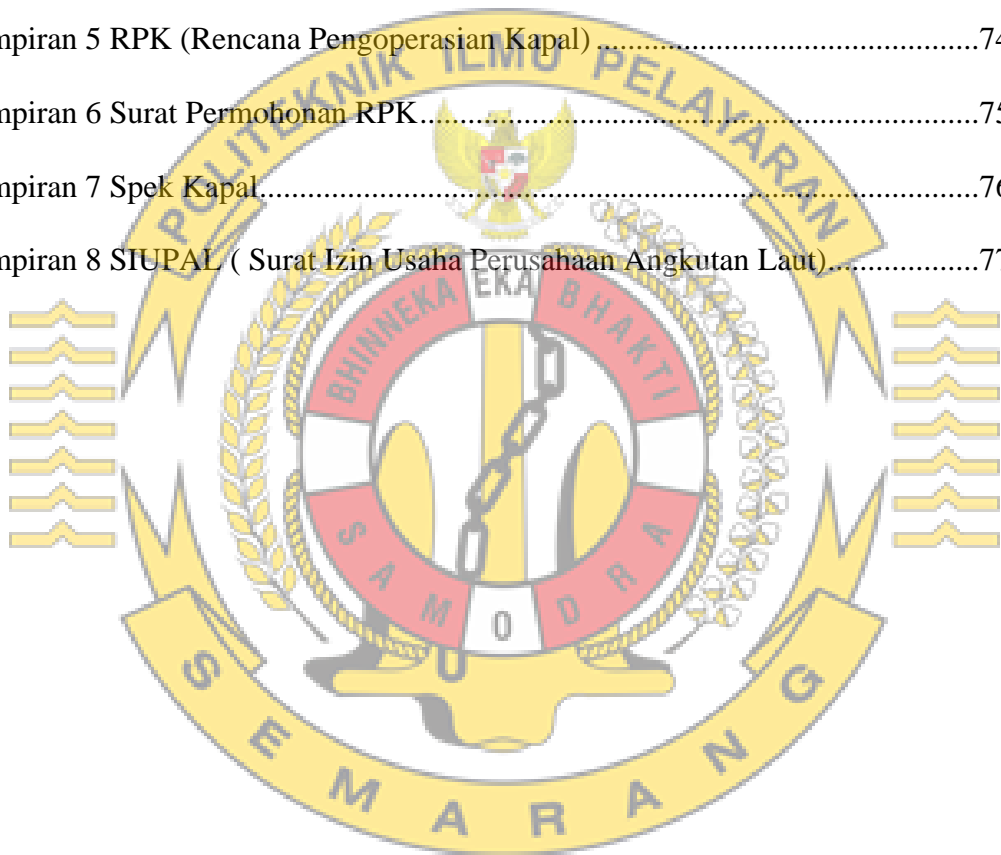


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Permohonan RPK.....	13
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian	20
Gambar 3. 1 Penarikan Kesimpulan.....	33
Gambar 4. 1 Peta lokasi Perusahaan	42
Gambar 4. 2 Halaman Login Website SIMLALA.....	52
Gambar 4. 3 Menu Permohonan Website SIMLALA	52
Gambar 4. 4 Submit Nomor Permohonan Pada Website SIMLALA.....	53
Gambar 4. 5 Submit Pelabuhan Pada Website SIMLALA.....	53
Gambar 4. 6 Submit Muatan Pada Website SIMLALA	54
Gambar 4. 7 Submit Voyage Report Pada Website SIMLALA	54
Gambar 4. 8 Submit Dokumen Persyaratan Pada Website SIMLALA.....	55
Gambar 4. 9 Alur Proses RPK Pada Website SIMLALA.....	55
Gambar 4. 10 Progress RPK Pada Website SIMLALA.....	56
Gambar 4. 11 Invoice RPK Pada SIMLALA.....	56
Gambar 4. 12 RPK Terbaru oleh SIMLALA.....	57
Gambar 4. 13 Daftar Permohonan pada SIMLALA	61
Gambar 4. 14 Daftar Permohonan pada SIMLALA	61
Gambar 4. 15 Daftar Permohonan pada SIMLALA	61
Gambar 4. 16 Daftar Permohonan pada SIMLALA	62
Gambar 4. 17 Website Kompres File.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Ratnawati Siburian (Staff Operasional).....	69
Lampiran 2 Wawancara dengan Utari Probowati Staff Operasional.....	71
Lampiran 3 Invoice RPK	73
Lampiran 4 MT. Bull Flores	73
Lampiran 5 RPK (Rencana Pengoperasian Kapal).....	74
Lampiran 6 Surat Permohonan RPK.....	75
Lampiran 7 Spek Kapal.....	76
Lampiran 8 SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut).....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kapal belakangan ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan permintaan, jenis muatan yang diangkut, perubahan teknologi dan kebutuhan pelayanan pengguna pelayaran. Apabila dibandingkan dengan moda transportasi yang lain, transportasi laut cenderung memiliki kapasitas angkut lebih besar dan lebih irit dalam hal konsumsi bahan bakar minyak. Transportasi laut mengurangi biaya karena kapasitas transportasi ditingkatkan dan bahan bakar minyak digunakan lebih efektif. Hal ini memungkinkan transportasi laut melintasi pulau dan negara, mengurangi biaya bongkar muat dan mengurangi waktu singgah di pelabuhan. Oleh karena itu, pengembangan dan adaptasi teknologi pelabuhan harus beriringan dengan perkembangan teknologi saat ini. Angkutan laut merupakan penggunaan kapal guna membawa penumpang, barang, dan hewan melalui badan air (menyeberangi lautan, sungai, dan danau) dan melalui beberapa wilayah (dalam atau luar negeri) guna keperluan pribadi dan umum.

Aktivitas angkutan laut dalam negeri diselenggarakan dan diimplementasikan dengan terstruktur, baik intramoda atau antarmoda, sehingga membentuk suatu sistem transportasi nasional. Aktivitas angkutan laut meliputi trayek tetap, reguler dan trayek tidak beraturan/ beraturan. Transportasi laut pada rute liner dan terjadwal berlangsung dalam suatu jaringan rute.

Jaringan trayek reguler dan terjadwal dikembangkan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional dengan mencermati saran dari organisasi pemakai jasa pelayaran.

Mengingat letak geografisnya, Indonesia merupakan negara maritim, sehingga mendukung transportasi laut dalam memberikan harapan dan nilai ekonomi yang baik. Kegiatan pelayaran dalam negeri berlaku sebagai penyelenggara transportasi laut nasional dan mempergunakan kapal dengan bendera Indonesia yang di dalamnya terdapat *crew* kapal dari Indonesia. Kapal asing tidak boleh membawa penumpang dan/atau muatan antar pulau atau pelabuhan di perairan Indonesia.

Salah satu solusi yang mungkin dapat menaikkan layanan transportasi laut di Indonesia yaitu dengan meningkatkan aspek *soft* infrastruktur dengan mengadakan platform teknologi informasi (TI) untuk perusahaan pelayaran yang berkecimpung di bagian jasa dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi pelabuhan standar untuk layanan pelayaran dan kargo fisik semua barang. Sistem informasi yang akan diimplementasikan perlu memikirkan aspek keamanan, kemudahan, dan efektivitas dari segi waktu dan anggaran.

Sebagai wujud dari pembenahan sisi *soft* infrakstruktur, Direktur Kementerian Perhubungan Menciptakan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA). Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA) memfasilitasi pemesanan pelayanan angkutan laut umum dengan *online* dan dapat mempermudah pengkajian operasional pelayanan guna terciptanya pelayanan yang transparan dan efisien. Bagian dari permintaan yang

ada pada *website* Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA) merupakan pengelolaan agenda kapal atau yang diketahui dengan RPK. RPK merupakan surat persetujuan penempatan kapal berbendera Indonesia di mana kapal tersebut akan singgah dengan melayani trayek berjadwal (*liner*) maupun trayek tidak berjadwal (*tramper*) untuk menunjang terselenggaranya aktivitas operasional angkutan laut dalam negeri.

Penetapan rute perjalanan kapal yang berjalan di Indonesia, yang ditentukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Regulasi ini mengatur tentang perusahaan pelayaran dalam negeri yang menyelenggarakan jasa pelayaran antar provinsi dan/atau internasional, termasuk penerbitan izin penyelenggaraan pelayaran dalam negeri dan penetapan persyaratan penggunaan bendera negara di perairan Indonesia. Penetapan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dilakukan guna mengelola pola trayek kapal nasional yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran yang beroperasi.

Terkait dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang menerbitkan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) guna mengelola trayek kapal di Indonesia, penyelesaian dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dilakukan oleh bagian kasubdit angkutan laut dalam negeri. Secara khusus, bagian ini bertanggung jawab atas penyelesaian dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa. Perusahaan pelayaran ini

memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK), sedangkan bagian kasubdit angkutan laut dalam negeri berperan menjadi penyedia jasa yang menerbitkan data tersebut.

Proses penyelesaian dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) yang masih mengandalkan sistem manual SIMLALA, tanpa adanya perkembangan sistem, mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan waktu bertugas, terutama karena banyak pemakai jasa yang mempunyai jadwal kerja yang padat. Keterbatasan tersebut menyebabkan sulitnya pendokumentasian Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) yang diperlukan dalam operasional kapal pada masing-masing pemilik kapal pengguna jasa dan belum bisa diminimalisir hingga saat ini.

Namun, Masih terdapat tantangan pada penyelesaian dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) yang belum optimal dalam waktu, karena banyaknya pengguna jasa yang mengajukan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) secara bersamaan. Jam kerja yang terbatas menjadi kendala tambahan bagi perusahaan pelayaran dalam melangsungkan operasional kapal. Sistem yang belum memadai saat penanganan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) menyebabkan akumulasi pengajuan dokumen yang terus bertambah. Permintaan untuk membuat dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) semakin meningkat setiap hari, dengan tujuan menciptakan kegiatan operasional yang lancar dan tidak ada halangan. Maka dari itu, peningkatan sistem penyelesaian dokumen Rencana Pengoperasian

Kapal (RPK) menjadi krusial untuk memastikan efisiensi kegiatan operasional perusahaan pelayaran di bidang angkutan laut dalam negeri di perairan Indonesia.

PT. Buana Lintas Lautan, Tbk merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang tanker minyak dan gas. Perusahaan ini berdiri tahun 2005 dan berlokasi di Jakarta Selatan, khususnya di daerah Kuningan. Operasional perusahaan fokus pada layanan pelayaran dalam sektor perkapalan, berlandaskan Anggaran Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU/0037456.AH.01.02 Tahun 2019.

Komitmen pada kualitas guna tercapainya keunggulan operasional kapal, PT. Buana Lintas Lautan, Tbk menekankan aspek keselamatan dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini tercermin dalam perolehan sertifikat ISO 9001:2015 (sistem manajemen mutu), ISO 14001:2015 (sistem manajemen lingkungan), dan ISO 45001:2018 (sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja). Selain itu, perusahaan menjalin kerjasama dengan PT. Pertamina untuk meningkatkan kualitas kegiatan sewa-menyewa kapal.

PT. Buana Lintas Lautan, Tbk telah siap dalam mengelola kapal yang dimiliki saat berada di pelabuhan yang dikunjungi dengan memakai Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Saat ini, perusahaan telah berkembang menjadi penyedia layanan yang menyederhanakan prosedur masuk dan keluar kapal di pelabuhan dengan memperkenalkan sistem trayek tramper. Trayek tramper adalah bentuk

transportasi yang fleksibel dan tidak terikat oleh peraturan formal seperti wilayah operasi, rute, tarif atau ketentuan kontrak transportasi. Namun pelayaran akan selalu tunduk pada hukum.

Perusahaan berkomitmen dalam usaha meningkatkan mutu layanan terhadap pelanggan. Hal ini terbukti melalui langkah progresif perusahaan dalam implementasi teknologi informasi dan mengembangkan sumber daya manusia bermutu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan pertumbuhan implementasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut, terutama pada tahapan kedatangan dan keberangkatan kapal. Peningkatan ini menjadi penting mengingat terdapat gangguan jaringan, kesalahan teknis, dan keterbatasan ketika memasukkan dokumen *clearance* dalam sistem. Identifikasi penyebab dari kendala-kendala tersebut perlu dilakukan untuk memahami mengapa ada halangan dalam implementasi SIMLALA pada kedatangan dan keberangkatan kapal, karena hal ini dapat berdampak pada kinerja PT. Buana Lintas Lautan, Tbk menjadi penyedia jasa pelayaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya jasa transportasi, khususnya transportasi laut, yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, dan untuk mengelola kebutuhan tersebut dalam suatu sistem transportasi nasional yang terintegrasi. Keberhasilan langkah tersebut diharapkan dapat menaikkan kemakmuran masyarakat dan menjadi tambahan modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul "**PROSES PENGURUSAN RPK PADA WEBSITE SIMLALA DI PT. BUANA LINTAS LAUTAN TBK**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, penelitian ini difokuskan pada observasi pengelolaan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan memanfaatkan *website* SIMLALA guna mendukung aktivitas operasional kapal. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupannya, sehingga peneliti memusatkan penelitian pada PT. Buana Lintas Lautan, Tbk sebagai subjek utama. Penelitian terhadap PT. Buana Lintas Lautan, Tbk bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dan dampak yang timbul selama proses pengelolaan RPK melalui aplikasi *website* SIMLALA, serta melihat usaha yang ditetapkan guna menanggulangi akibat dari masalah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengurusan RPK pada *website* SIMLALA?
2. Apa kendala pada pengurusan RPK pada *website* SIMLALA?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi terhambatnya proses pengurusan RPK pada *website* SIMLALA?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses yang diperlukan untuk pengurusan Rencana

Pengoperasian Kapal (RPK) dengan *website* SIMLALA.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengurusan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) melalui *website* SIMLALA.
3. Mengetahui usaha yang harus diimplementasikan guna menanggulangi kendala dalam pengelolaan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan *website* SIMLALA.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, peneliti berharap bisa membagikan manfaat untuk pembaca, baik untuk Taruna Prodi Nautika, serta Taruna Prodi Teknik dan terutama Taruna Prodi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK).

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menjadi referensi di kampus, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (PIP) tentang pengelolaan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) dengan menggunakan *website* SIMLALA. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan dalam tahapan pembelajaran, terutama bagi Taruna PIP Semarang yang mengambil jurusan Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan.
 - b. Pengembangan Wawasan, Penelitian ini menyajikan informasi tambahan yang dapat menumbuhkan dan menaikkan, pengetahuan

pembaca mengenai pengelolaan RPK dengan mengaplikasikan *website* SIMLALA.

Dengan demikian, manfaat teoritis ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di lingkungan akademis, khususnya di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya pemecahan masalah terkait RPK dengan menggunakan *website* SIMLALA. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan tahapan yang lebih terarah guna menaikkan efisiensi dan kinerja dalam pengelolaan RPK, sejalan dengan tujuan optimalisasi operasional kapal.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Proses

Proses merupakan susunan aktivitas yang berkaitan atau interaktif yang mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu proses secara umum dideskripsikan menjadi serangkaian tahapan sistematis yang dapat dilangsungkan berkali-kali guna tercapainya akhir yang diinginkan. Proses adalah suatu kegiatan yang direncanakan. Menurut Nana Suryapermana (2016), proses adalah rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Proses ini bisa berupa urutan peristiwa yang meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa proses adalah serangkaian tugas atau aktivitas yang saling berkaitan dan dipicu oleh peristiwa yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Suatu proses juga bisa didefinisikan menjadi serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara alami atau yang dirancang untuk mencapai suatu hasil dengan menggunakan waktu, ruang, pengetahuan, atau sumber daya lainnya. Efek dari suatu tahapan dapat mengubah properti dari satu atau lebih objek.

2. Pengertian Pengurusan

Pengurusan atau dapat disebut "Mengurus" adalah tindakan atau proses melakukan sesuatu untuk menyelesaikan atau memenuhi suatu

keperluan, tugas, atau tanggung jawab tertentu. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter: Menyatakan bahwa pengurusan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Secara umum, mengurus dapat merujuk pada berbagai aktivitas, seperti mengurus dokumen, mengurus administrasi, mengurus rumah tangga, mengurus keperluan pribadi, atau mengurus urusan pemerintahan. Tujuan dari mengurus adalah untuk mencapai suatu hasil atau penyelesaian yang diharapkan dalam konteks yang relevan.

3. Pengertian Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)

Menurut Muis Handoko (2011) RPK merupakan Dokumen yang menyatakan tentang jadwal pola trayek pelayaran kapal dan yang akan disinggahi. Dokumen ini digunakan sebagai lampiran pada saat pengurusan *clearance*.

Menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2014 Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) ialah surat penetapan kapal dalam trayek liner atau tramper angkutan laut dalam negeri. Dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) untuk kapal tramper mempunyai dasar hukum yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

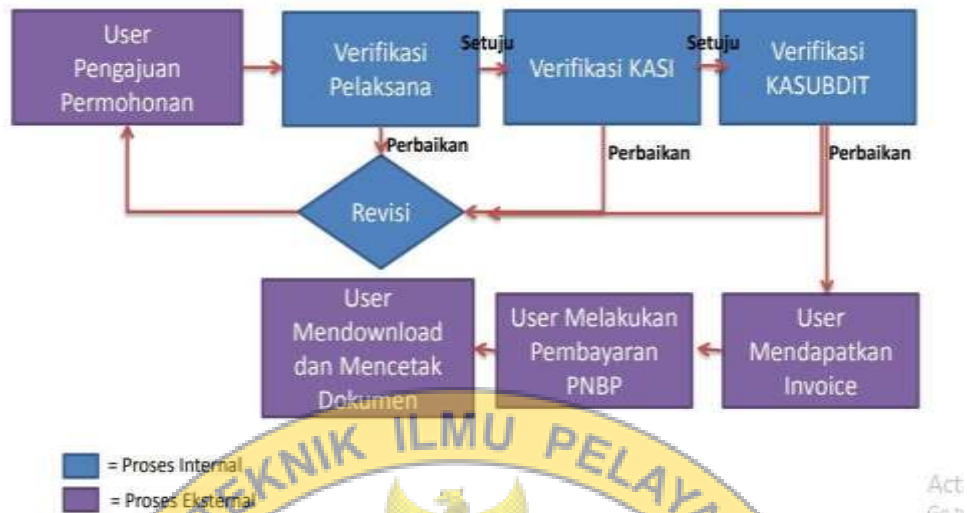
Persyaratan Rencana Pengoperasian Kapal :

- a. Surat permohonan perusahaan
- b. *Copy* SIUPAL
- b. *Copy* Spesifikasi kapal milik/*charter*/ dioperasikan yang masih berlaku
- c. Laporan realisasi perjalanan kapal (*voyage report*)

Jangka waktu 1 hari pengerjaan, apabila semua syarat lengkap dan selaras dengan ketentuan yang ada.

Perusahaan pelayaran di negara yang menjalankan kapal dapat menyampaikan Rencana Operasional Kapal (RPK) kepada Direktur Jenderal Pelayaran setiap tiga bulan sekali. RPK harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dikirimkan paling lambat 14 hari kerja sebelum jangka waktu RPK berakhir.

Alur Proses Permohonan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)



Gambar 2. 1 Alur Permohonan RPK

4. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA)

Sistem *website* berbasis *website* Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA) difungsikan guna memberikan pelayanan publik di bidang transportasi laut secara *online*. SIMLALA juga membantu memantau proses perizinan untuk memastikan pelayanan yang transparan dan efisien.

Menurut Bapak Sugihardjo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan, SIMLALA ialah bagian dari contoh langsung dari pelaksanaan regulasi deregulasi Presiden Joko Widodo. Deregulasi berarti izin yang tidak harus dihilangkan, izin yang bertahan lama, dan izin yang diperpanjang. Simlala sudah digunakan secara luas sejak tahun 2012. Selain itu, diharapkan pengguna Simlala, yaitu perusahaan pelayaran, dapat memaksimalkan manfaatnya. Untuk dapat mengakses portal SIMLALA tersebut, identitas pengguna yang sudah terdaftar diperlukan. Layanan

berbasis informasi teknologi (IT) ini dapat mencegah pungutan liar oleh aparat, untuk mengubah budaya kerja aparat dan melayani pengguna dengan baik. SIMLALA juga memungkinkan untuk memastikan kapan kapal akan berangkat, yang penting untuk bisnis. Harga barang dapat dipengaruhi oleh kepastian pemberangkatan kapal. Sugihardjo menyatakan bahwa Kemenhub membuat kebijakan yang memastikan keberangkatan kapal dengan pelayaran perintis untuk memberikan kepastian untuk masyarakat mengenai ketersediaan barang kebutuhan.

Kementerian Perhubungan sudah memasukkan 23 pelabuhan guna didaftarkan melalui *website* SIMLALA, dan pelayanan sistem *online* dapat didaftarkan kapan saja dan pembayaran bisa diimplementasikan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan layanan publik ini secara *online* melalui <https://simlala.dephub.go.id/simlala/>.

a. Layanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Secara *Online* (*E-Licensing*) :

1) SIUPAL

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan pelayaran dengan maksud membagikan keamanan operasional agar bisa berjalan dengan baik selaras dengan peraturan yang ada.

2) SIOPSUS

Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus

(SIOPSUS), yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, adalah surat izin bagi badan khusus pemerintah guna mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan pihak lain di wilayah perairan Indonesia.

b. Layanan Perizinan *Online* melalui Elektronik Internet (*E-SERVICE*):

1) RPK

Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) ialah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal berbendera Indonesia telah singgah di pelabuhan untuk menunjang aktivitas pelayaran dalam negeri. RPK terdiri atas angkutan tidak beraturan/tidak teratur (*irregular transport*) dan angkutan biasa (*linier transport*).

2) PKKA

Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) ialah surat kuasa dari perusahaan pelayaran nasional atau pembuat operasi maritim khusus guna pengangkutan kapal asing dengan pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

3) PPKN

Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) adalah surat persetujuan yang diberikan oleh perusahaan pelayaran nasional atau penyelenggara kegiatan pelayaran dari dalam negeri menuju ke luar negeri atau sebaliknya.

Menurut PM 93 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1, dari pelabuhan

atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia atau pelabuhan khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dilangsungkan oleh perusahaan pelayaran. Menurut PM 93 Tahun 2013 Bab 2 Pasal 20, aktivitas angkutan laut dengan luar negeri wajib dilangsungkan dengan memanfaatkan perusahaan pelayaran dalam negeri dan/atau kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing. PPKN diimplementasikan jika kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri memasuki wilayah pelabuhan Indonesia.

Terdapat 2 jenis PPKN, yaitu :

- a) Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) untuk angkutan laut luar negeri.
- b) Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional di Luar Negeri (PPKN) *Cross Trading*

5. Pengertian Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (DITLALA) adalah bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diatur oleh pasal 262 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Selain itu dijelaskan pada pasal 263 PM 122 Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melangsungkan:

- a. Mengembangkan regulasi penyelenggaraan transportasi laut, pelabuhan, infrastruktur maritim, perlindungan lingkungan laut, dan peningkatan keselamatan laut.
- b. Penyelenggaraan transportasi laut, pelabuhan, infrastruktur maritim, perlindungan lingkungan laut dan pelaksanaan kebijakan guna menaikkan keselamatan maritim.
- c. Mengembangkan standar, norma, prosedur, dan standar implementasi transportasi laut, pelabuhan, infrastruktur transportasi laut, melindungi lingkungan laut, dan memperkuat keselamatan laut.
- d. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap implementasi transportasi laut, pelabuhan, sarana dan prasarana transportasi laut untuk melindungi lingkungan laut dan meningkatkan keselamatan laut.
- e. Melakukan pemeriksaan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayaran, pelabuhan, sarana dan prasarana maritim, perlindungan lingkungan laut, dan menaikkan keselamatan laut.

6. Tugas dan Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- a. Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut :

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut bertanggung jawab untuk mendeskripsikan dan menerapkan kebijakan, standar, norma, panduan, karakteristik, dan tata cara, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bagian lalu lintas dan angkutan laut, baik dalam negeri maupun internasional; angkutan laut khusus; dan menaikkan sistem dan informasi angkutan laut.

b. Fungsi Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut :

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut. Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa :

1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) untuk Angkutan Barang di Laut adalah implementasi pelayaran angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan laut.

2) Sebagai kompensasi, pemerintah bertanggung jawab Pembiayaan alokasi kewajiban pelayanan umum pengangkutan barang melalui laut. Merupakan selisih antara biaya produksi dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, Pasal 5: 1) Menteri menetapkan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik guna angkutan barang di laut; 2) Menteri mendelegasikan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

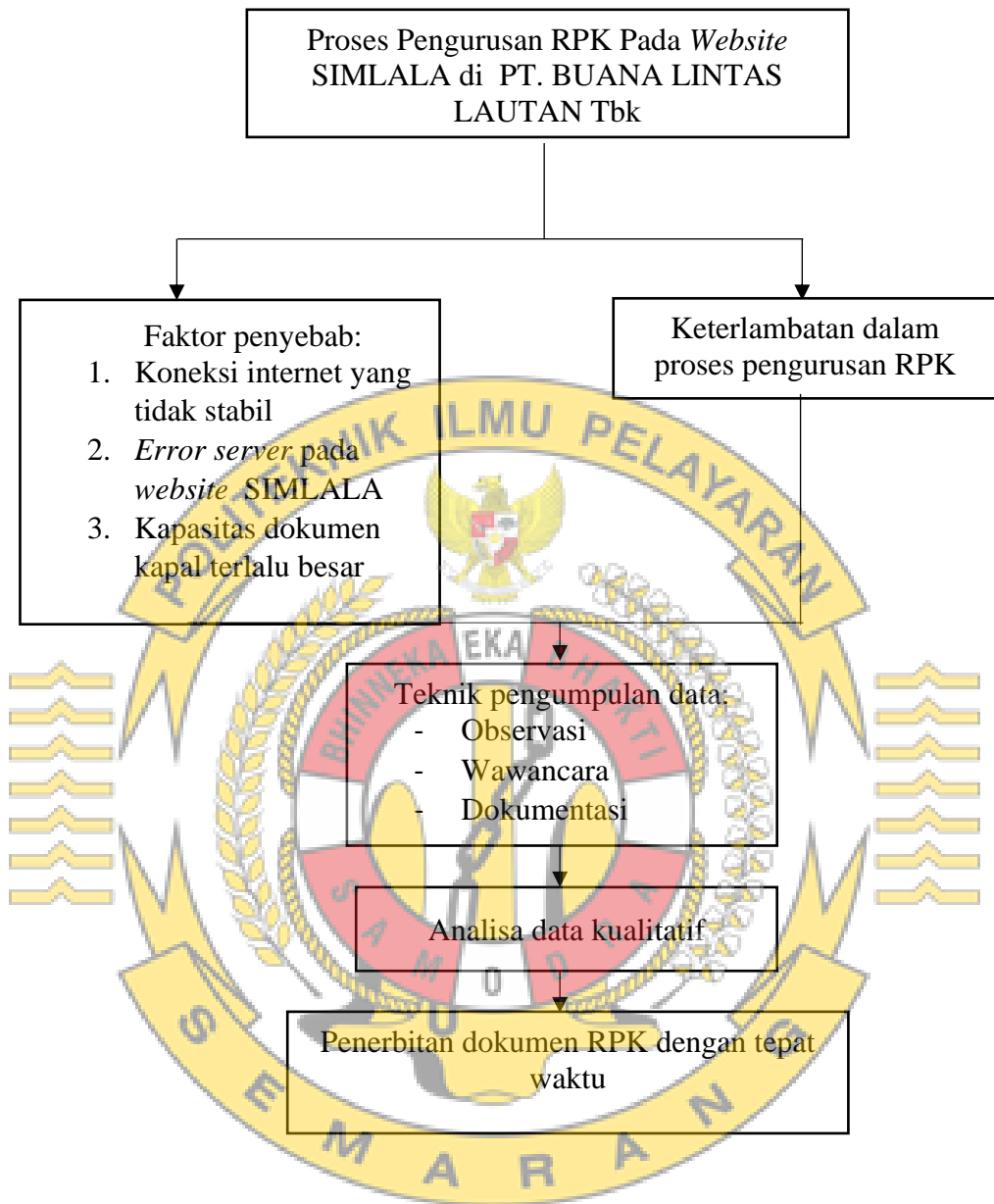
Menurut PM PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024 ialah penjelasan dari RPJMN Tahun 2020–2024, Perpres Nomor

18 Tahun 2020. Rencana ini mencakup tujuan, sasaran, dan prioritas Presiden selaras dengan bidang tugas dan fungsi tiap K/L dan Unit Kerja di bawahnya.

B. Kerangka Penelitian

Terkait pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, instansi tersebut bekerja sama dengan perusahaan pelayaran dan pengguna jasa terus berupaya untuk meningkatkan proses pengolahan dokumen guna meminimalisir penumpukan dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Selain tindakan dan peralatan yang tepat, sistem telah diciptakan guna mengurangi jumlah dokumen Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) yang dikumpulkan.

Peneliti membuat kerangka pemikiran tentang permasalahan yang timbul dalam sistem pelaksanaan penyelesaian Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dipahami, peneliti menyajikan kerangka berpikir sebagai konsep dan penjelasan dengan konsep sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

SIMLALA merupakan sebuah sistem *website* berbasis web yang memungkinkan pengguna mengajukan *online* permohonan pelayanan publik lalu lintas angkutan laut. *Website* ini juga memungkinkan pengguna memantau proses perizinan untuk memastikan bahwa layanan diberikan secara transparan dan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa masalah utama saat menggunakan *website* SIMLALA guna pengelolaan RPK ialah koneksi internet, kesalahan *server*, dan kapasitas file yang besar.

Keterlambatan dalam pengurusan RPK dengan menggunakan *website* SIMLALA juga akan mengakibatkan tertundanya pengiriman SPB, memberi dampak terhadap antrian kapal yang makin banyak dan meningkatkan tarif operasional ketika kapal tiba di pelabuhan. Selain biaya *docking*, bahan bakar, air bersih, dan anggaran yang lain, juga akan diubahnya slot antrian di pelabuhan muat atau bongkar yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak sama dengan target muat atau bongkar.

Usaha mengatasi kendala dalam pengolahan RPK menggunakan *website* SIMLALA antara lain dengan melakukan perbaikan pada *provider* internet yang optimal, melangsungkan *maintenance* terhadap *website* SIMLALA, dan memanfaatkan *website* sederhana seperti *website* kompresi dokumen.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Salah satunya yakni tidak semua perusahaan pelayaran mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk mengoperasikan *website* SIMLALA. Oleh karena itu, belum ada standar penggunaan *website* SIMLALA yang optimal.

C. Saran

Sehubungan dengan temuan peneliti mengenai penggunaan *website* SIMLALA dalam pengurusan RPK, peneliti menyarankan beberapa hal untuk dipertimbangkan dan diberikan kepada PT. Buana Lintas Lautan Tbk sebagai berikut:

1. PT. Buana Lintas Lautan Tbk sebaiknya melakukan evaluasi penggunaan *website* SIMLALA dan menyampaikan hambatan terhadap DITLALA.
2. Sebaiknya PT. Buana Lintas Lautan Tbk menambah *provider* koneksi internet terbaik pada perusahaan guna mendukung dan melancarkan kegiatan operasional.
3. Perusahaan diharapkan untuk lebih banyak menggunakan *website* sederhana misalnya *website* kompres dokumen atau data guna mengatasi dokumen persyaratan yang terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sudaryana, D. E. A., Ak, M., Agusiady, H. R., & SE, M. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. Deepublish.
- Dewanto, K. (2023). *Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) di Direktorat Lalu Lintas Laut dan Angkutan Laut* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).
- Fadillah, F. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA) terhadap Proses Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di PT. Buana Lintas Lautan, Tbk* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut, Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Indonesia. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–

2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020–2024, Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Robbins, S. P., Bergman, R., Stagg, I., & Coulter, M. (2014). *Management*. Pearson Australia.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryapermana, N. (2016). *Perencanaan dan sistem manajemen pembelajaran*. *Tsarwah*, 1(02), 29-44.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara Kepada Staff Divisi Operasional

Wawancara yang dilakukan peneliti tentang Proses Pengurusan RPK Pada Website SIMLALA di PT. Buana Lintas Lautan Tbk. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan untuk mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Nama : Ratnawati Siburian

Jabatan : Staff Operasional di PT. Buana Lintas Lautan Tbk

Nama	Uraian	Baris	Keterangan
Ica	Menurut mba, bagaimana kinerja operasional kapal pada pengurusan RPK menggunakan website SIMLALA?	1 2 3 4	
Mbak Ratna	Bisa lebih praktis soalnya udah online semua. cuman yang namanya sesuatu kalo online pasti masih banyak kurangnya, misal lagi koneksi jelek ya bikin buang waktu lama jadi ngehambat proses submit.	5 6 7 8 9 10 11	(KB:Mbak Ratna/W1/B.5-11)
Ica	Apa kendala yang terjadi pada penggunaan website SIMLALA?	11 12	
Mbak Ratna	Kendala yang sering dihadapi biasanya ya server down tapi kami maklum karena itu hal wajar jika banyak yang pakai atau bisa juga dalam pembaharuan sistem karena ini sistem baru juga sama file yang harus diupload harus 1 mb jadi kita harus compress dulu satu-satu pake website I love pdf.	13 14 15 16 17 18 19 20 21	(KB:Mbak Ratna/W1/B.13-16). (KB:Mbak Ratna/W1/B.18-21)

Ica	Menurut mba lebih nyaman menggunakan SIMLALA atau sistem manual?	22 23 24	
Mbak Ratna	Ya pasti enak pake website SIMLALA, karena semua sudah berjalan dengan sistem dan tidak perlu datang ke kantor. Tinggal tunggu approval aja dari petugas operator dan melakukan pembayaran melalu m-banking.	25 26 27 28 29 30 31	
Ica	Apa harapan mba dengan penggunaan sistem website SIMLALA dalam pelayanan operasional kapal?	32 33 34 35	
Mbak Ratna	Ya harapannya supaya sistem SIMLALA ini bisa dimaksimalkan, supaya pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien. Dan juga biar orang operasional yang lain bisa cepet hapal dan paham alur sistem nya ini jadi engga bergantung sama Cadet melulu. Biar pas cadet-cadetnya off saya sama operasional yang bisa pakai website SIMLALA ini untuk pengurusan RPT.	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	

Lampiran 2 Wawancara kepada Staff Divisi Operasional

Nama : Utari Probowati

Jabatan : Staff Operasional di PT. Buana Lintas Lautan Tbk

Nama	Uraian	Baris	Keterangan
Ica	Kendala apa yang mbak hadapi selama proses pengurusan RPK menggunakan website SIMLALA?	1 2 3 4	
Mbak Utari	Kendalanya ya di sistem sananya masih suka error, sistemnya down kadang sudah waktunya pembayaran tapi belum keluar billing pembayarannya. Ya mklum sih namanya aja sistem online.	5 6 7 8 9 10 11	(KB.Mbak Utari/W2/B.5-9).
Ica	Apakah keterlambatan pengurusan sertifikat berdampak pada operasional kapal?	12 13 14	
Mbak Utari	Jelas dong, dampaknya banyak sekali. Kalau kita tidak bisa clearance kita akan keluar biaya lebih saat kapal bersandar di pelabuhan untuk bahan bakar, fresh water, dan biaya-biaya lainnya, lalu juga akan mengubah slot antrian di pelabuhan muat atau bongkar yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak sesuai dengan terget muat ataupun bongkar.	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(KB.Mbak Utari/W2/B.16-26).
Ica	Bagaimana harapan mbak tentang penggunaan website SIMLALA dalam pelayanan kegiatan operasional kapal?	27 28 29 30	
Mbak Utari	Harapannya agar sistem ini bisa dikembangkan lagi, serta dioptimalkan lagi agar kegiatan operasional kapal, baik yang	31 32 33 34	

	perusahaan pelayaran dan agen bisa berjalan lancar, efektif, efisien, dan optimal. Ya pokoknya kita harus mendukung semua sistem yang dicanangkan pemerintah, karena tujuannya pasti baik.	35 36 37 38 39 40	
--	--	----------------------------------	--



Lampiran 3 Invoice RPK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110
 Telp Helpdesk: 151 / (021) 151 Email Helpdesk: info151@dephub.

BUKTI PEMBAYARAN # FR003230963				
NTPN	: CCC4348VV64ROULLU	<div style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Jenis Permohonan RPK TRAMPER KHUSUS </div>		
Kode Billing	: 820231222229694			
Perusahaan Angkutan Laut	: PT. NUSA BHAKTI			
Tanggal Invoice	: 22 Dec 2023 09:00:00			
No. Invoice	: FR003230963			
Total Tagihan	: IDR 100.000,00			
No	No. Permohonan	Nama Kapal	Tanggal Pelunasan	Jumlah Tagihan
1	080/BULL/OPS/XII/2023	BULL FLORES	22 Dec 2023 09:00:00	IDR 100.000,00
Total				IDR 100.000,00

Silakan simpan bukti pembayaran ini sebagai salah satu bukti pembayaran yang sah.
 Terima Kasih.

Lampiran 4 MT. Bull Flores



Lampiran 5 RPK (Rencana Pengoperasian Kapal)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 17 S.D. 21**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
JAKARTA - 10110

TEL: 3813008, 3500006, 3813269, 3447017,
3842440
PST: 4213, 4227, 4208, 4135

TEL: 3844482, 3458540
FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.302/2000/12780/11481/23 Jakarta, 22 Desember 2023

Klasifikasi
Lampiran
Perihal

: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

Kepada
Direktur
PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA
Danatama Square II Lantai 2-3 Jl.
Mega Kuningan Timur Blok C6
Kav. 12A RT. 005 RW. 003, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setia Budi

Jakarta Selatan - 12950

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut - Pasal 10 ayat 1 dan menunjuk surat Saudara No. 080/BULL/OPS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut:

- a. Nama Kapal : BULL FLORES
- b. Nomor Pendaftaran : 2016 Per No. 9410L
- c. Type : Kapal Tanker Minyak / Oil Tanker
- d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : 23235,71 t
- e. Tenaga Penggerak (HP) : 0
- f. Kapasitas Angkut : 0
- g. Status Kepemilikan Kapal : Milik
- h. Kode Trayek : 0
- i. Pelabuhan Pangkal : 0
- j. Route Trayek : Arjuna, Jawa, Balikpapan/Tuks Pt. Pertamina, Balongan/Tersus Pt. Pertamina (Persero), Banyuwangi/Tanjung Wangi, Bay. Sau/Tersus Pt. Pertamina, Batam/Batu Ampar, Belawan/Tuks Pertamina, Bontang/Tuks Pt. Pertamina, Cika, Jawa, Dama/Tuks Pertamina, Gresik/Tuks Pertamina Aspal, Kalbut/Sls Pertamina, Kotabaru/Sls Pt. Pertamina, Langsa, Lomaria/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Mekar Putih, Merak, Muntok/Sls Pertamina, Nipah Panjang, Pangkajene Susu/Tuks Pertamina, Pengapen/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Plaju/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Pulau Laut, Pulau Sembur/Tersus Pertamina, Samarinda/Tuks Pt. Pertamina, Semarang/Tersus Pertamina, Semarang/Tanjung Emas, Sungai Pakning/Tuks Pertamina, Tanjung Cerep/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Tanjung Intan / Cilacap, Tanjung Manggis/Tersus Pt. Pertamina, Tanjung Perak, Tanjung Santan, Tanjung Uban/Tersus Pertamina, Tanjung Wangi/Menend, Tarakan/Tuks Pt. Pertamina, Teluk Kabung/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Tg. Priok/Tuks Pertamina, Tuban/Tersus Pertamina, Wayama/Tuks Pt. Pertamina (Persero)
- k. Dipensi : GASOLINE 88 RON UNLEADED
- l. Nomor dan Tanggal STMPAL/SIOPSUS : BX-357/AL.001 TANGGAL08-9-2014
- m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/33743/16 05 Oktober 2016
- n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Dalam Negeri Periode Sebelumnya : 0

3. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, Saudara wajib memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
- b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
- e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
- f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
- g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.

4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Dec 27, 2023 9:17:58 AM s.d tanggal Mar 26, 2024 9:17:58 AM.

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
7. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.



AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.S
KASUBDIT ANGKUTAN LAUT KHUSUS DAN
USAHA JASA TERKAIT

Ttd

MOHD ARIEF AGUSTIAN, S.ST.PEL
NIP. 19880831 201012 1 001

Lampiran 6 Surat Permohonan RPK

PT NUSA BHAKTI JAYARAYA
Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav.12A,
Kawasan Mega Kuningan
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
P: +62 21 30485700, F: +62 21 30485701

Jakarta, 18 Desember 2023

Nomor : 080/BULL/OPS/XII/2023
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal
Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Khusus

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
JAKARTA – 10110

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pemasalahan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut:

- Nama Kapal : MT. BULL FLORES
- Nomor Pendaftaran : 2019 Pst No. 9119/L
- Tipe : Kapal Tanker Minyak / Oil Tanker
- Indikator (GT/Boat/Mati (DWT) : 73235 / 77996.71
- Tenaga Penggerak (HP) : 9480
- Kapasitas Angkut : 10
- Status Kepemilikan Kapal : Milik
- Route Trayek : Arjuna-Jawa, Balikpapan/Tuks Pt. Pertamina, Balongan/Tersus Pt. Pertamina (Persero), Banyuwangi/Tanjung Wangi, Bau-Bau/Tersus Pt. Pertamina, Batam/Batu Ampir, Belawan/Tuks Pertamina, Bontang/Tuks Pt. Pertamina, Cinta, Jawa, Dumai/Tuks Pertamina, Gresik/Tuks Pertamina Aspal, Kalbot/Sis Pertamina, Kotabaru/Sis Pt. Pertamina, Langsa, Lomantis/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Mekar Putih, Merak, Muntok/Sis Pertamina, Nipah Panjang, Pangkalan Susu/Tuks Pertamina, Pengapen/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Plaju/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Pulau Laut, Pulau Sambu/Tersus Pertamina, Samarinda/Tuks Pt. Pertamina, Semampir/Tuks Pertamina Surabaya, Semarang/Tanjung Emas, Sragai/Pakung/Tuks Pertamina, Tanjung Gerem/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Tanjung Intan Cilacap, Tanjung Manggis/Tersus Pt. Pertamina, Tanjung Perak, Tanjung Santan, Tanjung Uban/Tersus Pertamina, Tanjung Wangi/Meneg, Tarakan/Tuks Pt. Pertamina, Teluk Kabong/Tuks Pt. Pertamina (Persero), Tig. Priok/Tuks Pertamina, Tuban/Tersus Pertamina, Wayame/Tuks Pt. Pertamina (Persero)
- Urgensi : Gasoline 80 Ron/Unleaded
- Nomor dan Tanggal SIOPSUS : B X-357/AL-001/TANGKAL/08.9.2014
- Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL-005/2000/1907/1460/19.29 April 2019
- Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya

Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sd tanggal 20 Maret 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,

PT NUSA BHAKTI JAYARAYA

Michael M. Guruhwan
Direktur/Director

Lampiran 7 Spek Kapal



Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

TEL: 3813008, 3500006, 3813269, 3447017,
3842440
PST: 4213, 4227, 4209, 4135

TEL: 3844492, 3456540
FAX: 3811786, 3845430, 3507076

Lampiran : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
Nomor : B X-357/AL.001
Tanggal : 08 September 2014

Nomor Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/1907/19
29 April 2019

SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA

1. Nama Kapal : BULL FLORES
2. Nama Pendaftaran : 2016 Pat No. 91194
3. Grosse Akte Nomor : 9119
4. Dikeluarkan Oleh : JAKARTA
5. Tanda Selar : GT/23235 No. 7613/Bc
6. Pemilik Kapal : PT. Nusa Bhakti Jayaraya
7. Nama Panggilan (Call Sign) : YBGB2
8. Nama Galangan/ Tahun Pembuatan : ULSAN, KOREA / 2001
9. Bendera : ID
10. Dikelaskan Pada : BAJA
Daerah Pelayaran : Semua Laut
Kode Kelas : -
11. Type Kapal : Kapal Tangki Minyak / Oil Tanker
12. Ukuran Pokok :
 - a. Panjang kapal seluruhnya (LOA) : 182,55 meter
 - b. Panjang antara garis tegak (LBP) : 126,21 meter
 - c. Lebar Kapal : 27,34 meter
 - d. Dalam (h) : 16,7 meter
 - e. Draft Kapal :
 1. Sarat musim panas (Summer Draft) : 10,67 meter
 2. Sarat musim dingin (Winter Draft) : - meter
 3. Draft pada air tawar : 10,89 meter
 4. Sarat Tropik (Tropical Draft) : - meter
 - f. Isi Kotor (GT) : 23235
 - g. Bobot Mati : 77995,73 ton
 - h. Kapasitas Muat :
 1. Penumpang : - orang
 2. Mobil/Truck : - unit
 3. Kontainer : - unit
 4. Grain Space : - ton
 5. Bale Space : - ton
13. Jumlah Awak Kapal (Crew) : 10 orang
14. Jumlah Palka : 10
15. Crane Kapal (Deck) :
 - a. Jumlah : 2 unit
 - b. Kapasitas Angkat : 10 ton
16. Mesin Induk :
 - a. Merk : MANB&W 9480 KW
 - b. Tahun : 2001
 - c. Nomor : 6850MC-C
17. Kecepatan / Speed :
 - a. Maksimum : 12 knot
 - b. Normal : 10 knot
 - c. Ekonomis : 9 knot
18. Bahan Bakar :
 - a. Jenis Bahan Bakar yang digunakan : MDO
 - b. Kebutuhan Bahan Bakar per hari (dalam) : 4 ton

Jakarta, 29 April 2019

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KASUBDIT PENGEMBANGAN USAHA DAN ANGKUTAN
LAUT



Ttd

RADEN BAHSAN ARIFIN, SE., MM
NIP. 196309101996031001

Lampiran 8 SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 | TEL. : 3811308, 3505906, 3813259, 3447017 | TLX : 3844492, 3458540
JAKARTA - 10110 | PST. : 4213, 4227, 4209, 4135 | FAX : 3811786, 3845430, 3507576

SURAT KETERANGAN

No. *XL.001/21/16/17*

1. Berdasarkan surat PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA Nomor : 17NB.0064/IX/CY tanggal 25 September 2017, perihal Perubahan Domisili Perusahaan sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No.2057/27.1BU.1/31.74.02.1008-071-562/e/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuningan Timur, dengan ini diadakan Perubahan Domisili Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA**

Nomor & Tgl. SIUPAL : **B.X-357/AL.001 tanggal 29 Agustus 2014**

Domisili Perusahaan Lama : **Gd. Menara Global Lt.17 Suite D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.27 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan**

Domisili Perusahaan Baru : **Danatama Square II Lantai 2-3 Jl. Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12 A RT.005 RW 003, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi Kota Administrasi, Jakarta Selatan**

2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA No. B.X-357/AL.001 tanggal 29 Agustus 2014, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Jakarta, **03 OCT 2017**

**AN, DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
KASUBDIT PENGEMBANGAN USAHA ANGKUTAN LAUT**

Tembusan

1. Dirjen Hubla;
2. Sesditjen Hubla;
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.



Model Tambah 02

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

PENGUKUHAN
PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA
NO. B.X-357/AL.001 TANGGAL 29 AGUSTUS 2014
EVALUASI PEMEGANG IZIN USAHA SETIAP 2 (DUA) TAHUN

Dengan ini dinyatakan bahwa hasil evaluasi berkala telah sesuai dengan PERMENHUB No. PM. 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Bab IV pasal 69 butir (6) tentang tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan Laut.

Evaluasi Dua Tahun Pertama	Evaluasi Dua Tahun Kedua
Tempat : Jakarta Tanggal : 24 Agustus 2014 Nama & TTD : BUDI RAHAYU, PM	Tempat : BONGARA Tanggal : 18 JULI 2017 Nama & TTD : MUHAMMAD SAIFUL, ST-M.MTC
Evaluasi Dua Tahun Ketiga	Evaluasi Dua Tahun Keempat
Tempat : Tanggal : Nama & TTD :	Tempat : Tanggal : Nama & TTD :
Evaluasi Dua Tahun Kelima	Evaluasi Dua Tahun Keenam
Tempat : Tanggal : Nama & TTD :	Tempat : Tanggal : Nama & TTD :
Evaluasi Dua Tahun Ketujuh	Evaluasi Dua Tahun Kedelapan
Tempat : Tanggal : Nama & TTD :	Tempat : Tanggal : Nama & TTD :
Evaluasi Dua Tahun Kesembilan	Evaluasi Dua Tahun Kesepuluh
Tempat : Tanggal : Nama & TTD :	Tempat : Tanggal : Nama & TTD :



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110**

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGGUKAN LAUT (SIUPAL)

[Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan]

NOMOR : **B. 8-357/AL.001**

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. 14NB30003/VIT/L/C tanggal **04 Agustus 2014**

diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada:

Nama Perusahaan : **PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA**
 Alamat Kantor Perusahaan : **Gd. Menara Global Lt.17 Suite D, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav.27 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan**
 Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : **JANNER TANDRA (Direktur)**
 Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : **Villa Gading Indah F/6 RT.001 RW.014, Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 03.080.410.8-063.000**
 Nomor Pokok Wajib Pajak : **Rp. 6.000.000.000,00**
 Nilai Modal Perusahaan : **PMDN**
 Status Perusahaan : **PMDN**

Kewajiban Pemegang SIUPAL:

1. Memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, keselamatan, kesehatan dan keajaiban dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas keakuratan laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik antar pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau trampet melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan tahunan keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktik berlayar (Praker Layar) bagi kapal yang berukuran GT 750 keatas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.


SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, mengorek jahat usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkannya selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : **JAKARTA**
 Pada tanggal : **29 AGUSTUS 2014**

Penanggung Jawab


JANNER TANDRA
 (Direktur)


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BOBBY R. MAMAHT
 Pembina Utama (IV/e)
 (NIP. 19560912 198503 1 002)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TEL: 3813008, 3500006, 3813269, 3447017,
3842440
PST: 4213, 4227, 4209, 4135

TEL: 3844492, 3458540
FAX: 3811786, 3845436, 3507576

BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS

Nomor : AL.010/1562/DA-2023
Tanggal : 11 Mei 2023

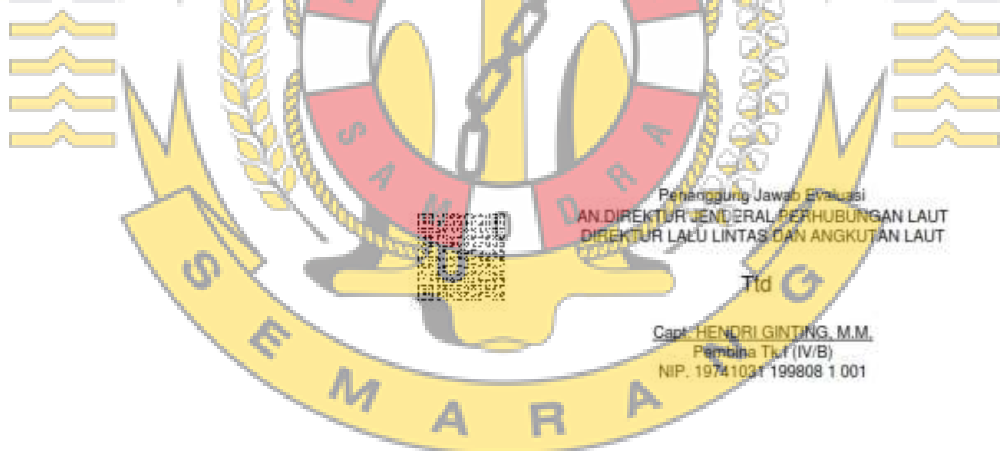
Pada hari ini Jumat tanggal 01 September tahun 2023 Petugas Evaluasi / Endorsement SIUPAL dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-357/AL.001 Tanggal 08 September 2014 telah melaksanakan Evaluasi / Endorsement dan verifikasi data administrasi dan teknis kepemilikan SIUPAL sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 74 Tahun 2015 bahwa:

Nama Perusahaan : PT. NUSA BHAKTI JAYARAYA
Domisili : Danatama Square II Lantai 2-3 Jl. Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12A RT. 005 RW. 003, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi
Penanggungjawab Perusahaan : MICHAEL MURNI GUNAWAN (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Penanggungjawab : Tmn Kebon Jeruk Pt 19 RT.004 RW.012 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Telah menginput data sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan berlaku sampai dengan 11 Mei 2025

Berita Acara Evaluasi / Endorsement Siupal / Siopsus ini merupakan pengganti pengukuhan evaluasi pemegang izin per 2 (dua) tahun sekali.

Demikian Berita Acara Evaluasi / Endorsement SIUPAL ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dalam penetapan sebagaimana mestinya.



Penanggung Jawab Evaluasi
AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Ttd

Capt. HENDRI GINTING, M.M.
Pemula Tkt (IV/B)
NIP. 19741031199808 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Anisah Nur Hasanah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 21 Juli 2002
3. NIT : 572011337573 K
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Golongan Darah : B
7. Alamat : Singkil RT 01 RW 09,
Grogol, Sukoharjo
8. Nama Orang Tua
Ayah : Sutigno
Ibu : Duwi Hastuti
9. Riwayat Pendidikan
SD : SDIT Darul Falah
SMP : SMP Negeri 1 Grogol
SMA : SMA Batik 1 Surakarta
Perguruan Tinggi : PIP Semarang
10. Praktek Darat
Perusahaan Pelayaran : PT. Pelni Persero
: PT. Buana Lintas Lautan Tbk